

BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai perbandingan dampak krisis finansial Asia 1997-1998 dan krisis global 2008 terhadap Indonesia dipandang dari segi ekonomi politik, maka pada bab 5 ini, penulis akan mengajukan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran yang dapat diajukan guna mengatasi permasalahan-permasalahan terkait penanganan kedua krisis baik krisis finansial Asia 1997-1998 maupun krisis global 2008

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari indikator-indikator pada Bab 4 semakin mempertegas bahwa keterkaitan antara aspek politik serta ekonomi dalam suatu negara sangatlah erat sehingga apabila salah satu sektor mengalami guncangan maka akan merambat pada sektor lainnya yaitu sektor politik serta sosial.

Kekuatan politik Pemerintah pada saat krisis memiliki efek langsung terhadap besaran dampak krisis finansial bagi Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dengan terjadinya krisis kepercayaan yang mengarah pada krisis politik di Indonesia pada masa krisis finansial Asia 1997-1998 menyebabkan perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Sedangkan dalam pemerintahan SBY meskipun belum sepenuhnya ideal, indikator politik menyatakan kondisi Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat sehingga besaran dampak krisis global 2008 di Indonesia tidak terlalu besar bahkan hampir tidak terasa di Indonesia.

Tabel 5.1

**Ringkasan Kecenderungan (*Trend*) Indikator-indikator Politik pada Periode
Krisis Finansial Asia 1997-1998 dan Krisis Global 2008**

Indikator / Periode Krisis	Krisis Finansial Asia 1997-1998	Krisis Global 2008
Ekonomi		
Pertumbuhan PDB	Menurun	Meningkat
Investasi	Menurun	Meningkat
Aliran Modal	Menurun	Meningkat
Fluktuasi Mata Uang	Menurun	Meningkat
Inflasi	Menurun	Meningkat
Politik		
Voice and Accountability	Menurun	Meningkat
Political Stability	Menurun	Meningkat
Government Effectiveness	Menurun	Meningkat
Regulatory Quality	Menurun	Meningkat
Rule of Law	Menurun	Meningkat
Control of Corruption	Menurun	Meningkat

Berdasarkan pada uraian serta ringkasan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya krisis finansial 1997-1998 semua indikator baik indikator ekonomi maupun politik menunjukkan penurunan.

Indonesia dengan gejolak politik yang memanas pada periode krisis finansial Asia 1997-1998 kemudian semakin membuat Indonesia terpuruk dalam krisis. Krisis finansial Asia 1997-1998 memiliki dampak yang sangat besar terhadap Indonesia dalam berbagai sektor. Krisis yang diawali dari krisis moneter ini kemudian merambat pada krisis multi sektor termasuk krisis politik serta krisis sosial.

Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang terkena dampak krisis paling parah. Negosiasi yang dilakukan Indonesia dalam paket pemulihan yang ditawarkan oleh IMF berjalan alot sehingga penandatanganan kontrak dianggap terlambat. Di saat Indonesia berlutut dengan negosiasi paket pemulihan IMF, Thailand sebagai negara yang pertama kali didera krisis justru telah melakukan proses pemulihan. Thailand pertama kali menandatangani kontrak dengan IMF kemudian melakukan negosiasi. Hal yang terbalik dilakukan oleh Indonesia sehingga dengan alotnya proses negosiasi, masyarakat asing semakin tidak percaya dengan keseriusan Indonesia dalam penanganan krisis serta dalam proses reformasi.

Krisis Finansial Asia 1997-1998 tidak hanya menghilangkan kepercayaan para investor asing, namun krisis ini juga menghilangkan kepercayaan masyarakat atas Pemerintahan yang sedang berkuasa pada saat itu yaitu Pemerintahan Soeharto. Masyarakat menilai bahwa Soeharto tidak mampu lagi menangani krisis yang terjadi. Hal ini kemudian disuarakan oleh para mahasiswa dan beberapa lapisan masyarakat melalui aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan pada bulan Mei 1998.

Demonstrasi ini menuntut Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak lagi pro-rakyat. Pada 32 tahun pemerintahannya, Soeharto berhasil melanggengkan kerajaan bisnis milik kroni-kroni serta anak-anaknya melalui praktek KKN. Praktek KKN ini jelas-jelas merugikan negara dan masyarakat. Dana-dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk proses pembangunan Indonesia kemudian diselewengkan untuk membangun kerajaan bisnis milik Keluarga Cendana. Masyarakat banyak dirugikan karena selama Pemerintahan Soeharto, masyarakat mendapatkan banyak tekanan baik dalam

kehidupan ekonomi maupun kehidupan bernegara. Indonesia dalam masa pemerintahan Soeharto seolah-olah dikuasai oleh kekuatan Soeharto yang mendapat dukungan penuh dari militer Indonesia.

Pada tahun 1990-an hubungan Soeharto dengan ABRI tidak seharmonis dulu, sehingga kekuatan Soeharto lambat laun mulai pudar pada tahun-tahun berikutnya. Tidak hanya dukungan dari ABRI yang sudah mulai kendur, dukungan dari pengikut setia Soeharto seperti Harmoko yang pada masa akhir jabatan Soeharto menduduki kursi Ketua MPR juga ikut memudar. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh tekanan masyarakat kepada Harmoko yang sudah seharusnya mewakili aspirasi rakyat untuk meminta pengunduran diri Soeharto atau pencabutan mandat dari MPR terhadap Soeharto. Pada tekanan yang dihadapi ini, Harmoko kemudian membuat pernyataan bahwa Soeharto agar mengundurkan diri secara terhormat.

Krisis Finansial Global 2008 yang berawal dari kegagalan *subprime mortgage* memiliki dampak yang besar bagi perekonomian AS. Krisis kredit yang melanda AS berdampak sangat besar pada perekonomian AS dimana suku bunga kredit perumahan meningkat tajam yang menyebabkan kegagalan pembayaran kredit perumahan oleh para konsumen potensial. Kegagalan ini kemudian berdampak pada meningkatnya jumlah tunawisma di AS. Peningkatan ini cukup drastis hingga di beberapa negara bagian di AS terdapat perkampungan tenda yang berisikan para pemilik rumah akibat dari kegagalan mereka membayar kredit rumah mereka dan harus kehilangan tempat tinggal. Selain meningkatnya tunawisma, jumlah pengangguran di AS juga meningkat tajam akibat ditutupnya beberapa institusi finansial besar di AS.

Krisis global 2008 ini kemudian juga memiliki dampak hampir di seluruh dunia. Hal ini disebabkan sistem ekonomi pasar yang diterapkan oleh AS mulai meluas diadopsi di berbagai belahan dunia. Sistem ekonomi pasar ini nyatanya sangat rapuh dan sangat rentan terhadap terjadinya krisis ekonomi. Perdagangan saham serta mata uang yang menandai sistem kapitalis ini merupakan salah satu aspek yang paling rentan menjadi sumber awal masuknya krisis ekonomi ke suatu

negara. Hal ini terbukti pada awal proses terjadinya kedua krisis baik krisis finansial Asia 1997-1998 maupun krisis global 2008.

Sektor yang terdampak krisis global 2008 secara signifikan di Indonesia adalah sektor perdagangan saham. Meskipun pada perdagangan mata uang Rupiah sempat melemah namun dengan intervensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia kembali dapat mengoreksi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Sebagaimana dijelaskan bahwa dampak krisis global 2008 terhadap Indonesia tidaklah terlalu besar bahkan Indonesia tidak secara langsung terkena dampak krisis global ini. Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Bab 3 mendapatkan keuntungan karena sistem perekonomian yang lebih bersifat kedalam (*inward*) dan partisipasi Indonesia dalam perekonomian global dapat dikatakan minim.

Dengan asumsi kecenderungan indikator-indikator ekonomi maupun politik sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 5.1, maka dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini saling memiliki keterkaitan. Aspek ekonomi dan politik sangat erat terkait sehingga apabila kecenderungan perekonomian menurun maka aspek politik pun akan mengikuti kecenderungan penurunan ini, begitu juga sebaliknya.

Indikator-indikator politik yang tercantum dalam Tabel 5.1 di atas menjadi fokus penelitian dalam tesis ini dimana Penulis berusaha membedah keenam indikator politik di atas sebagaimana tercantum dalam Bab 4. Kecenderungan yang ditunjukkan oleh keenam indikator ini semakin memperkuat pandangan Gilpin bahwa ekonomi internasional yang stabil dan sejahtera (seperti ekonomi domestik) membutuhkan pondasi politik yang kuat dan stabil guna mengikat lembaga dan hukum yang mengatur sistem tersebut serta untuk mencegah permasalahan meningkat menjadi krisis.

Dari keenam indikator, Penulis menekankan pada stabilitas politik serta kontrol terhadap korupsi. Stabilitas politik pada kenyataannya memiliki pengaruh yang sangat besar pada implikasi yang ditimbulkan oleh sebuah krisis di Indonesia. Instabilitas politik ditambah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada periode krisis Finansial Asia 1997-1998 terhadap Soeharto mengakibatkan Indonesia tidak hanya mengalami krisis dalam bidang ekonomi

Universitas Indonesia

namun juga meluas pada krisis politik dan sosial. Lebih jauh lagi kondisi instabilitas politik ini memberikan dampak negatif pada hilangnya kepercayaan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tidak adanya kepastian dalam segi ekonomi, politik serta sosial pada periode itu menjadi faktor utama ditariknya dana investasi para pemodal asing dari Indonesia. Proses reformasi di segala bidang kemudian menjadi tuntutan dari seluruh lapisan masyarakat guna memperbaiki kondisi pemerintahan pada saat itu. Selain dari dalam negeri, reformasi juga mendesak dilakukan sebagaimana dipersyaratkan dalam salah satu poin *Letter of Intent (LoI)* dari IMF untuk skema bantuan ke Indonesia.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh periode krisis global 2008 yaitu pada masa pemerintahan SBY. Sebagaimana dijelaskan dalam poin 4.2 pada bab 4 bahwa kondisi politik Indonesia relatif lebih stabil. Krisis yang terjadi tepat di saat akan diselenggarakannya Pemilihan Umum Presiden ini memberi dampak tersendiri pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh SBY pada periode itu. Guna mempertajam politik pencitraan oleh SBY maka kebijakan yang diambil merupakan kebijakan-kebijakan jangka pendek yang bersifat langsung. Hal ini tentu saja berdampak positif karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY yang diyakini mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat melalui skema-skema bantuan langsung ini.

Selain stabilitas politik, indikator yang mendapat penekanan khusus oleh Penulis dalam penulisan tesis ini adalah kontrol terhadap korupsi. Indikator ini sangat penting karena tindakan korupsi yang marak terjadi di Indonesia berdampak pada besaran implikasi krisis yang dialami. Kasus korupsi yang banyak terjadi pada periode krisis finansial Asia 1997-1998 mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Setelah badai krisis yang menerpa yang berakibat pada meningkat secara signifikannya hutang luar negeri Indonesia, tindakan korupsi semakin memperparah kondisi ini karena hutang luar negeri yang digunakan hanya sedikit yang terserap secara riil untuk kemudian digunakan pada program-program serta proyek-proyek pemerintah untuk pembangunan.

Universitas Indonesia

Meskipun kecenderungan kontrol terhadap korupsi pada masa pemerintahan SBY atau pada periode krisis global 2008, meningkat namun praktek-praktek korupsi masih sering dilakukan baik oleh para pejabat pemerintah maupun oleh para pengusaha. Kecenderungan peningkatan kontrol terhadap korupsi pada periode ini dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dapat menunjukkan keseriusan dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Oknum-oknum yang terlibat dalam tindakan ini juga berasal dari para penegak hukum sendiri. Hal ini mengakibatkan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan akan sistem hukum di Indonesia. Dalam kaitannya dengan penanganan krisis global 2008, tindak korupsi jelas merugikan negara sebagaimana dijelaskan pada salah satu contoh kasus Bank Century dalam bab 4. Selain merugikan negara, kasus Century ini juga secara langsung menimbulkan kerugian pada nasabah karena dana yang mereka investasikan tidak dapat diselamatkan.

Dalam memahami kesimpulan dari temuan-temuan penelitian ini maka penulis berusaha untuk melakukan sebuah ringkasan atas implikasi krisis baik krisis finansial Asia 1997-1998 maupun krisis global 2008. Ringkasan ini merujuk pada beberapa sudut pandang yaitu sektor-sektor yang terdampak krisis, implikasi krisis pada kondisi perekonomian Indonesia, implikasi krisis pada gejolak politik di Indonesia, implikasi pada kondisi sosial masyarakat Indonesia serta besaran implikasi dari kedua krisis ini baik Krisis Finansial Asia 1997-1998 maupun Krisis Global 2008. Berikut adalah tabel yang berisi ringkasan implikasi krisis baik krisis finansial Asia 1997-1998 maupun krisis global 2008 terhadap Indonesia.

Tabel 5.2

**Ringkasan Implikasi Krisis Finansial Asia 1997-1998 dan Krisis Global 2008
terhadap Indonesia**

Implikasi Krisis	Krisis Finansial Asia 1997-1998	Krisis Global 2008
Sektor yang Terdampak Krisis	Sektor Perekonomian, Sosial serta Politik	Sektor Keuangan dan Perbankan
Kondisi Perekonomian	Kehancuran perekonomian Indonesia ditandai dengan terdepresiasinya Rupiah hingga 300%	Dampak tidak terasa secara langsung karena perekonomian Indonesia yang bersifat <i>inward</i>
Gejolak Politik	Sangat berkejolak akibat munculnya gerakan reformasi	Relatif tidak berkejolak karena tepat pada saat Pemilu Presiden
Kondisi Sosial Masyarakat	Banyak terjadi penjarahan akibat menurun secara signifikannya kemampuan ekonomi masyarakat	Relatif stabil karena masyarakat tidak merasakan dampak krisis secara langsung
Besaran Dampak	Sangat Besar	Hampir tidak terasa dampaknya

Berdasarkan pada tabel ringkasan implikasi kedua krisis di atas maka dapat dipahami bahwa krisis pada kedua periode ini berbeda apabila dilihat dari sudut pandang di atas. Sebagaimana yang terlihat pada Kolom Krisis Finansial Asia 1997-1998 yang menunjukkan implikasi yang terjadi pada beberapa sektor yaitu sektor ekonomi, politik serta sosial pada akhirnya akan menghancurkan

Universitas Indonesia

kondisi perekonomian Indonesia begitu juga dengan gejolak politik yang dihasilkan pada krisis ini. Gejolak politik pada periode ini sangat bergejolak yang ditani dengan gerakan masyarakat dan mahasiswa yang disebut juga gerakan reformasi. Sedangkan pada sektor sosial, krisis finansial Asia 1997-1998 menghasilkan banyaknya pengangguran dan bertambahnya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Akumulasi dari kekacauan di berbagai sektor ini adalah besarnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Berbeda halnya dengan yang ditunjukkan pada kolom Krisis Global 2008. Pada kolom ini dapat dilihat bahwa sektor yang terkena dampak krisis adalah sektor keuangan dan perbankan. Selain itu kondisi perekonomian Indonesia tidak terdampak secara langsung akibat dari krisis global yang berlangsung karena sifat dari krisis ini yang melanda pasar keuangan internasional dimana partisipasi Indonesia pada pasar global masih sangat minim. Sektor perekonomian Indonesia sebagaimana terlihat dalam tabel lebih bersifat domestik atau *inward*. Pada gejolak politik, implikasi krisis pada periode ini tidak menimbulkan gejolak politik sehingga formulasi kebijakan dalam penanganan krisis dapat lebih mudah diterima baik oleh masyarakat maupun oleh sektor swasta. Seiring dengan relatif stabilnya kondisi politik di Indonesia pada periode ini, kondisi sosial masyarakat di Indonesia juga relatif stabil dan pada akhirnya dampak krisis global ini tidak terasa secara langsung di masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Guna melakukan tindakan antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya krisis ekonomi di masa yang akan datang sebaiknya Pemerintah dapat memformulasikan kebijakan yang menekankan peran negara dalam pelaksanaannya.

2. Guna memerangi tindakan KKN serta dalam rangka peningkatan aspek politik di Indonesia, hendaknya Pemerintah menyediakan fasilitas hukum yang kuat. Dengan kuatnya aspek hukum di Indonesia, maka diharapkan dapat meminimalisir tindakan KKN yang sudah membudaya di Indonesia ini.
3. Setelah penyediaan fasilitas hukum yang memadai, langkah selanjutnya adalah pengawasan baik dari Pemerintah maupun masyarakat. Dengan kuatnya pengawasan terhadap perilaku KKN maka kesempatan untuk melakukan tindakan ini akan menjadi lebih kecil.
4. Selain itu, semua sistem baik sistem perekonomian, politik maupun sosial haruslah diperkuat. Sistem yang saat ini berlaku di Indonesia terbukti masih lemah. Apabila dilihat dari sektor politik maka Indonesia masih sangat rentan terhadap terjadinya konflik kepentingan, sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini nampaknya belum berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi